

- Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Alhaff, R. N., Agustini, E., & Rostina, J. (2012). PEngetahuan dan Sikap Anggota DPR RI Periode 2009-2014 terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*.
- Alifah, P., Rahmawati, R., & Faedlulloh, D. (2021). Effort of "Komisi Nasional Perempuan" in Struggling for PKS Bill in Indonesia. *Atlantis Press*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2-3.
- Amalia, M. (2020). Analisis Sosiokultural terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Sains dan Teknologi*.
- Arifin, A. (2003). *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Kota.
- Arifin, M. Z., Hidayati, R., & Faisol. (2022). PERlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Dinamika*.
- Arliman, L. (2017). Komnas Perempuan sebagai State Auxiliary Bodies dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia. *Selisis Volume 3*.
- Ballington, J., & Karam, A. (1998). *Women in Parliament: Beyond Numbers*. Sweden: IDEA.
- Basarah, A. (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Bodies dalam Struktur Ketatanegaraan. *Jurnal MMH Jilid 43*.
- Beckwith, Karen (1986) *American Women and Political Participation*. New York: McGraw Hill.
- Chema, & Keban. (2008). *Dimensi Strategi Administrasi Publik*. Jakarta.
- Firmansyah, A. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.
- Gregory. (2005). *Public Relations*. Jakarta: Erlangga.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200702090607-32-519880/riwayat-ruu-pks-di-dpr-sarat-kecurigaan-mengulur-pembahasan>

- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*.
- Immaduddin, A. H., Nadhira, H., & Nuramalia, S. (2020). Mengapa RUU PKS Sulit disahkan? Telaah Kritis dan Reflektif terhadap Dinamika Pengesahan RUU PKS dan Para Pemangku Kepentingan. *KOPAJA* #4, 2.
- Koepl, P. (2001). The acceptance, relevance and dominance of lobbying the EU Commission. A first-time survey of the EU Commission 's civil servants. *Journal of Public Affairs*.
- Komnas Perempuan. (1999). *Temuan Kerusakan Mei 1998*.
- Komnas Perempuan. (2011). *Standard Operation Produce Sistem Penerimaan Pengaduan*.
- Komnas Perempuan. (2021). Peran Komnas Perempuan dalam Mendorong Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*.
- Lailiana, N. N. (2021). Polemik Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual (RUU PKS): Studi Kritis dan Prospektif. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*.
- Lewicki, R. J., Barry, B., Saunders, D. M., & Minton, J. W. (1999). *Negotiation* (Fourth Edi). New York: Mc-Graw Hill.
- Martin, C. J. (2013). *Negotiating Agreement in Politics*. Washington: American Political Science Association.
- McCammon, H. J., Muse, C. S., Newman, H. D., & Terrell, T. M. (2007). Movement framing and discursive opportunity structures: The political successes of the U.S. women's jury movements. *American Sociological Review*.
- Miller, O., 2014. The Negotiation Style: A Comparative Study between the Stated and in-Practice Negotiation Style. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.
- Moelong, L. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Journal Unnes*.

- Patra, R. (2012). Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan di Indonesia. *Jurnal MMH*.
- Povey, T. (2012). *Women in Parliament*. London.
- Prabowo, E., Sulismadi, & Safri. (2016). Theoretical Review of Political Communication and Political Achievement Strategy. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*.
- Rauf, M. (1998). *Indonesia dan Komunikasi Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Ross, J. (1953). *Women and Parliamentary Elections*. JSTOR.
- Rizky, P. A., & Mar'iyah, C. (2021). Advokasi Kebijakan RUU PKS: Analisis Pemberitaan Media Perempuan Magdalene.co dan Konde.co. *The Journalist: Social and Government*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung.
- Valiente, C. (2008). Women in Parliament: The Effectiveness of Quotas. In: Tremblay, M. (eds) *Women and Legislative Representation*. Palgrave Macmillan, New York.
- Venus. (2009). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan kampanye komunikasi*. Bandung.